

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa

Desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [12].

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta *deshi* berarti tanah air, tanah air atau tempat lahir. Dengan demikian, kata desa sering dipahami sebagai nama tempat atau suatu wilayah (sebagai tanah asal) di mana penduduk berkumpul dan tinggal, menggunakan lingkungan setempat untuk menopang, mendukung dan mengembangkan kehidupan mereka [3]. Desa memiliki peran penting dalam upaya untuk menentukan arah visi yang ingin dicapai. Aspek penting dalam proses untuk mencapai visi ini adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang penting untuk diketahui adalah bagaimana permasalahan yang dihadapi desa dan seberapa besar potensi desa [13]. Secara umum, fungsi desa adalah sebagai berikut:

1. Desa sebagai hinterland yaitu daerah dukung yang memberi bahan pokok seperti padi, jagung, hingga ketela. Desa juga menyediakan beragam makanan lain seperti kedelai, kacang, sayur-sayuran, dan jenis buah-buahan. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja. Dari segi kegiatan kerja, desa merupakan agraris, desa manufaktur, desa nelayan, dan desa industri [14]
2. Sebagai pelestari kearifan lokal yaitu banyak sekali kebudayaan lokal yang hingga kini tetap lestari di masyarakat pedesaan. Dengan adanya desa, maka kebudayaan lokal akan senantiasa terjaga dan terus berkembang.
3. Sumber tenaga kerja, hal ini karena masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong - royong menjadi kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian. Desa juga termasuk sumber

tenaga kerja bagi kota, karena masyarakat yang berasal dari desa biasanya berkerja di kota sebagai buruh atau di sektor informal.

4. Mitra pembangunan, hal ini karena masyarakat desa juga berfungsi sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Mitra ini akan diperoleh dalam waktu cepat maupun lambat, tergantung dengan hubungan atau kerja sama yang dilakukan masyarakat didalamnya.

2.1.1. Tipologi Desa

Tipologi desa adalah kondisi spesifik keunggulan potensi dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta sarana dan prasarana dalam menentukan arah pembangunan dan pengembangan masyarakat atas dasar karakteristik komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing desa atau kelurahan. Semua desa atau kelurahan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik tertentu, yang prioritas pembangunannya lebih potensial untuk diarahkan pada mata pencaharian utama. Tipologi dan klasifikasi tingkat perkembangan desa meliputi empat bagian, keempat bagian tersebut merupakan suatu kesatuan dan mempunyai hubungan erat kaitannya satu sama lain [15]. Adapun empat bagian tersebut yaitu: (1) Potensi dasar, yaitu potensi dasar suatu desa merupakan modal dasar dari desa yang bersangkutan untuk mencapai pembangunan, yang terdiri dari potensi alam, potensi penduduk dan lokasi/letak desa terhadap pusat fasilitas. Potensi dasar yang diolah dan dikembangkan oleh masyarakat serta menjadi sumber pendapatan sebagian besar masyarakat, (2) Tipe desa, ditentukan berdasarkan pendekatan potensi yang dominan untuk diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber pendapatan sebagian besar masyarakat desa, (3) Indikator tingkat perkembangan desa, yaitu kondisi yang memberikan pedoman (terukur) sejauh mana hasil proses suatu kegiatan/program dalam pembangunan desa telah dapat dicapai selama periode waktu tertentu dan (4) Tingkat perkembangan desa.

Tipologi Desa merupakan karakteristik dan kondisi aktual yang khas dengan keadaan desa saat ini serta kondisi yang berubah berkembang dan yang diharapkan terjadi di masa depan. Tipologi Desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa [4].

Tipologi desa berdasarkan tingkat pengembangan desa dibagi menjadi Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat tertinggal, yakni dengan penjelasan sebagai berikut [4]:

1. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
2. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta memiliki kemampuan dalam mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan sebagai instrumen dalam menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki potensi menjadi desa maju, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum terkelola secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang pengelolaannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak memiliki kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2.1.2. Potensi Desa

Potensi desa merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan desa yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong tercapainya kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua: Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat

dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa [1].

Potensi desa sangat berpengaruh dalam perkembangan desa beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri [5] sebagai berikut:

1. Potensi Sumber Daya Manusia, berupa masyarakat desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi, mempunyai jiwa wirausaha yang kuat, mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.
2. Potensi Sumber Daya Alam, berupa potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan, pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra), skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Pasar, berupa produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar, produk masyarakat mempunyai daya saing pasar, kelembagaan dan budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2.2. Kemandirian Desa

Kemandirian (*resilience*) dalam ilmu sosial sering disamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengatur diri sendiri dan keberlanjutan diri. Sedangkan menurut Verhagen, (1996) jika melihat dari perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau sekelompok orang yang tidak lagi tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya. Kemandirian desa atau desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan desanya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, desa mandiri memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi [16]. Manfaat dari desa yang telah mandiri adalah berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa, meningkatnya kemandirian desa dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan, serta mengurangi disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota [17].

Karakteristik kemandirian desa merupakan bahan dasar yang harus dimiliki oleh desa mandiri. Karakteristik kemandirian desa yang perlu dipenuhi yakni, mempunyai potensi sumber daya alam, mempunyai potensi sumber daya manusia, mempunyai potensi prasarana dan sarana yang memadai, mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa, mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa, terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa, tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata, pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi desa, terdapat beberapa kelembagaan di desa, adanya tokoh penggerak /inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat, dan kesadaran terhadap lingkungan hidup tinggi [5].

2.3. Konsep Desa Mandiri

Konsep desa mandiri merupakan pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terpadu mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (*supporting system*). Pengembangan yang akan dilakukan pada desa mandiri, adalah pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa, pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta pengembangan jejaring dan kemitraan [17]. Adapun beberapa konsep desa mandiri sebagai berikut:

1. Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari kehari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan [18].

2. Desa Mandiri Energi

Desa Mandiri Energi dapat didefinisikan sebagai desa yang dapat memproduksi energi berbasis energi baru dan terbarukan untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desanya, energi tersebut termasuk Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain (Permen ESDM No. 32 Tahun 2008). Dari segi ekonomi, Desa Mandiri Energi memiliki tujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif, mengurangi kemiskinan, dan menambah lapangan kerja untuk mensubstitusi bahan bakar minyak sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan daerah [19]

3. Smart Village

Smart village merupakan sebuah konsep yang menghadirkan ekosistem yang memungkinkan pemerintah, industri, akademisi maupun elemen masyarakat terlibat untuk menjadikan desa menjadi lebih baik. Dalam konsep desa cerdas, konsep ini diukur dengan melihat kinerja pengelolaan sumber daya desa sehingga menjadi lebih efisien, berkelanjutan dan melibatkan beragam elemen masyarakat. Konsep *Smart village* dibutuhkan untuk memberikan kemampuan terhadap desa-desa agar mampu mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahan tersebut (*understanding*), serta dapat mengatur (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakatnya. *Smart village* dapat didefinisikan sebagai desa pintar yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat [20].

2.4. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan secara sadar dan dipimpin oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, ke arah modern dalam rangka pembangunan bangsa”. Pada hakekatnya, pembangunan adalah tindakan yang disengaja dari partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam mengejar modernitas dengan perencanaan langsung [13]. Pembangunan pedesaan menjadi bentuk pembangunan yang

berkelanjutan dan komprehensif selalu menjadi salah satu perhatian utama bagi pembangunan masing-masing negara. Pembangunan desa dipandang menjadi strategi krusial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendistribusikan secara optimal manfaat yang muncul menurut pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan akan mengubah desa-desa yang secara tradisional terisolasi menjadi masyarakat yang mengalami regenerasi ekonomi nasional [21].

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi [12]. Adapun tujuan pembangunan desa [17] adalah:

1. Meningkatkan pelayanan pertanahan dan menangani masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan kabupaten
2. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas pemukiman yang nyaman, aman, dan sehat;
4. Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah;
6. Meningkatkan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar daerah, dan
7. Pembangunan pedesaan

2.5. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk oleh Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mengatasi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. [4]. IDM diharapkan mampu mencakup semua bidang kehidupan desa

yang memberi kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan karakteristik yang dimilikinya [22].

Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain untuk menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa, menjadi bahan penyusunan target lokasi berbasis desa, menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah dan desa, serta lembaga lain. Melalui IDM status kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan status desa dandiri atau bisa disebut sebagai desa dembada, desa maju atau desa pra-sembedada, desa berkembang atau desa madya, desa tertinggal atau bisa desa pra-madya dan desa sangat tertinggal atau desa pratama) [13].

Klasifikasi yang lebih luas dalam lima jenis status desa diperlukan untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman isu-isu yang melekat di desa. Seperti diketahui bersama, isu-isu desa sejauh ini merupakan isu yang kompleks. Tantangannya adalah merepresentasikan kompleksitas itu ke dalam status, sehingga perumusan isu dan targetting (fokus dan lokus) lebih terarah dan terpusat. Alasan lain adalah menghindari moral hazard dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan desa sehingga tidak mengulangi praktek-praktek pembangunan yang serba bias dan merugikan kehidupan desa [13].

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut; Desa Sangat Tertinggal; $IDM \leq 0,4907$, Desa Tertinggal; $0,4907 < IDM \leq 0,5989$, Desa Berkembang ; $0,5989 < IDM \leq 0,7072$, Desa Maju; $0,7072 < IDM \leq 0,8155$, Desa Mandiri; $IDM > 0,8155$ [23].

2.5.1. Dimensi Pembentukan Indeks Desa Membangun

Dimensi yang membentuk Indeks Desa Membangun (IDM) terdiri dari 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimensi ketahanan ekonomi menjadi salah satu pendorong kemajuan desa. Perkembangan IDM dapat dibentuk oleh faktor ekonomi meliputi produksi desa, akses distribusi, akses perdagangan, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan terhadap perdagangan. Dimensi sosial yaitu kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman. Sedangkan dimensi ketahanan lingkungan yaitu kualitas lingkungan hidup, potensi rawan bencana [21].

1. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Dimensi Ketahanan ekonomi yang membentuk IDM antara lain produksi desa, akses distribusi, akses perdagangan, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan terhadap perdagangan. Dimensi ketahanan ekonomi erat kaitannya dengan perputaran uang dan pemerataan pendapatan di desa. Semua aspek dari dimensi ketahanan ekonomi mencerminkan pembangunan desa yang semakin meningkat. Faktor yang paling penting dari dimensi ini memiliki efek samping yang sangat serius bagi pembangunan desa. Akses lembaga keuangan merupakan faktor penting untuk membuka usaha baru dipedesaan. Akses lembaga keuangan berhubungan dengan kemajuan permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga ekonomi di desa seperti pembangunan BUMDes yang menjadi salah satu prioritas dari Kementerian Desa dan PDTT. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Keterbukaan dari desa terhadap beberapa hal sangat penting dilakukan. Keterbukaan tersebut dapat meningkatkan pengaruh luar desa untuk membantu kemajuan desa. Desa tidak boleh menutup diri dari perubahan teknologi dan kemajuan jaman. Kemampuan desa untuk membuka dirinya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya didesa akan sangat baik bagi perkembangan ekonomi desa [5].

2. Dimensi Ketahanan Sosial

Dimensi ketahanan sosial dalam pembentuk Indeks desa Membangun yaitu kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman. Pelayanan kesehatan dapat diukur dengan waktu tempuh ke prasarana kesehatan dalam waktu kurang dari 30 menit. Akses sarana dan prasarana kesehatan yang tidak terlalu jauh menjadikan poin penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan dana desa terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan didesa. Dimensi sosial yang dibangun dari aspek pendidikan antara lain akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah yang jaraknya kurang dari 3 kilometer sampai 6 kilometer. Akses ke pendidikan nonformal, termasuk kegiatan pemberantasan buta aksara, pendidikan anak usia dini; pusat kegiatan belajar masyarakat/ paket ABC; dan

akses ke pusat keterampilan/ kursus. Dimensi Modal Sosial ditunjukkan pada pembangunan solidaritas sosial, pembangunan kebiasaan gotong royong di desa, keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar. Dimensi ketahanan sosial dalam pembangunan pemukiman meliputi akses terhadap air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses listrik, akses ke informasi dan komunikasi [5].

3. Dimensi ketahanan lingkungan

Dimensi ketahanan lingkungan antara lain kualitas lingkungan hidup dan potensi rawan bencana. Kualitas lingkungan hidup berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan hidup yang bersih dan berkualitas meliputi ada tidaknya pencemaran air, tanah dan udara. Sumber air yang berada di desa yaitu sungai. Beberapa sungai yang terkena limbah menjadikan sumber air semakin membahayakan dan harus ditangani. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan), dan upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) [5].

2.6. Perencanaan Desa Berbasis Masyarakat

Masyarakat (*community*) berperan sebagai subjek pembangunan secara berkelanjutan yang memiliki modal sosial dalam pembangunan desa atas dasar sifat gotong-royong dan kekeluargaan dalam suatu tatanan perdesaan. Fungsi masyarakat dalam mengembangkan kemandirian desa didasarkan pada kapasitas yang muncul melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna yang luas baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meliputi sandang, pangan, dan papan, serta menyangkut perannya dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan pembangunan jangka panjang [24].

Perspektif atau sudut pandang masyarakat desa penting untuk kemandirian desa dalam melihat potensi dan masalah yang ada di desa agar permasalahan-permasalahan yang ada di desa dapat ditangani. Keterlibatan masyarakat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desanya, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Perencanaan partisipatif merupakan usaha yang dilakukan masyarakat

untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat [25].

Model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah suatu pendekatan dalam pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang artinya masyarakat ditempatkan sebagai pusat (*people centry development*) dalam paradigma pembangunan. Strategi pemberdayaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dapat dilakukan dengan pendekatan secara individu maupun kelompok, untuk membangun dan meningkatkan potensi masyarakat agar mampu menanggulangi berbagai persoalan yang dihadapinya dengan baik. Pemberdayaan masyarakat dapat ditumbuhkan melalui penyuluhan atau proses pembelajaran untuk merubah perilaku, sikap yang subsisten tradisional menjadi berwawasan modern, yang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri, memberikan respon yang tepat terhadap berbagai perubahan dan tantangan sehingga mampu mengendalikan usahanya dan mendorong untuk lebih mandiri [26].

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peninjauan terhadap penelitian lain sangatlah penting sebagai relevansi penelitian yang dahulu dan yang akan dilakukan.

Penelitian oleh Asbeni (2020) yang berjudul Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri merupakan penelitian yang paling medekati. Pada penelitian Asbeni memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mendeskripsikan potensi ekonomi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi, dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya terhadap pengembangan potensi desa, serta

mengkaji bagaimana langkah pemerintah desa dan masyarakat dapat menentukan strategi pengembangan ekonomi menuju desa mandiri, yaitu desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung dengan bantuan dari pemerintah, dan penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan pada lokasi kajian dan variabel yang digunakan.

Penelitian oleh Mir'atun Nur Arifah dan Nugrahani Kusumastuti (2018) yang berjudul Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan transformasi pembangunan hingga menjadikan Desa Kemadang menjadi desa mandiri. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan desa kajian sudah bertatus desa mandiri sehingga penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi agar Desa Sungai Rengas dapat mempertahankan kemandirian desanya.

Penelitian terdahulu oleh Fatmawati, Lukman Hakim, dan Mappamiring (2020) yang berjudul Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa bertujuan untuk penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan variabel penelitian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi. Pada penelitian yang akan dilakukan melihat SDA yang ada di Desa Sungai Rengas yang dilihat dari partisipasi masyarakat desa atau keterlibatan masyarakat desa dalam kemandirian desa.

Penelitian oleh Hafny Aisyatul Huda, Utang Suwaryo, dan Novie Indraswari Sagita (2020) yang berjudul Pengembangan Desa Berbasis *Smart Village (Studi Smart Governance)* pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk menganalisis pengembangan Desa Talagasari dengan konsep *smart village* dengan menggunakan aspek *smart governance* dalam mengeksplorasi pelayanan di Desa Talagasari. Pada penelitian

yang akan dilakukan akan merumuskan konsep Smart Village menjadi strategi dalam mempertahankan kemandirian Desa Sungai Rengas.

Penelitian oleh Encang Saepudin, Ninis Agustini Damayani, Agung Budiono (2018) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi pada program desa mandiri pangan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dalam penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian oleh Aji Rayi Purwasi dan Retno Sunu Astuti (2021) dengan judul Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembangunan kemandirian desa yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang disalurkan kepada masing-masing desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan hanya melihat pemanfaatan dana desa pada Desa Sungai Rengas dalam mendukung kemandirian desa.

Penelitian oleh Muhammad Sukarno (2020) dengan judul Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM) (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan sifat yang tepat dari gejala atau tanda-tanda selanjutnya perkembangan hubungan antara objek penelitian dengan fenomena sosial lainnya dan analisis naratif untuk menggambarkan sebuah fenomena dan membedah mengenai inovasi yang dilakukan oleh Desa Ponggok dalam melaksanakan pembangunan berbasis IDM. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat karakteristik kemandirian di Desa Sungai Rengas.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1.	Asbeni (2020)	Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri	Untuk mendeskripsikan potensi ekonomi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi di desa Sekura, dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya terhadap pengembangan potensi desa, serta mengkaji bagaimana langkah pemerintah desa dan masyarakat dapat menentukan strategi pengembangan ekonomi menuju desa mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian dan Perkebunan • Perdagangan • Industri • Wirausaha • BUMDes 	Analisis Focus Group Discussion (FGD), Analisis SWOT dan QSPM	Penelitian menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Desa Sekura meliputi: sektor perdagangan, kewirausahaan dan industri, sedangkan, faktor pendukung utama adalah keadaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa yang sudah memadai. Adapun strategi pengembangan berdasarkan SWOT adalah : a) Pendirian BUMDes dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang dimiliki; b) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki; c) meningkatkan kualitas masyarakat melalui pelatihan tentang kewirausahaan; d) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang potensi wirausaha. Tingkat kepentingan dari berbagai macam strategi yang didapatkan dari hasil SWOT, adalah sebagai berikut : 1)Pendirian BUMDes dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang dimiliki; 2)Meningkatkan kualitas masyarakat melalui pelatihan tentang kewirausahaan; 3)Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki; dan 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang potensi wirausaha.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil
2.	1. Mir'atun Nur Arifah 2. Nugrahani Kusumastuti (2018)	Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri	Untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan transformasi pembangunan hingga menjadikan Desa Kemadang menjadi desa mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi ketahanan sosial • Dimensi ketahanan ekonomi • Dimensi ketahanan ekologi 	Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal strategi yang dilakukan, pemerintah Desa Kemadang melakukan pemetaan potensi, pembinaan dan pendampingan, membangun sinergisitas dan menerapkan tata kelola desa menjadi organisasi modern. Sedangkan wujud dari transformasi pembangunan itu sendiri ialah terjadi peningkatan pada pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan. Dalam keragaman produksi masyarakat dan program dalam hal mitigasi bencana juga turut meningkat
3.	1. Fatmawati 2. Lukman Hakim 3. Mappamiring (2020)	Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa	Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan • Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan • Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja • Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha 	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dinilai belum optimal, dilihat dari aspek (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan; (3) Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja; dan (4) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil
ekonomi						
4.	1. Hafny Aisyatul Huda 2. Utang Suwaryo 3. Novie Indraswari Sagita (2020)	Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)	Untuk menganalisis pengembangan Desa Talagasari dengan konsep smart village dengan menggunakan aspek smart governance yang dikemukakan oleh Santoso dkk (2019:15) dalam mengeksplorasi pelayanan di Desa Talagasari.	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Optimalisasi Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Dan Kebijakan Transparansi informasi 	Deskriptif Triangulasi sumber.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Desa Talagasari sudah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) terlihat dari Akses kemudahan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial facebook dan whatsapp yang membantu koordinasi antara perangkat desa dengan warga masyarakat.
5.	1. Encang Saepudin 2. Nimis Agustini Damayani 3. Agung Budiono (2018)	Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan/Perencanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat 	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi dapat dikategorikan positif artinya partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan statistik yang menggambarkan bahwa nilai median lebih kecil dari nilai skor dan nilai skor lebih kecil dari nilai kuartil III. Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada

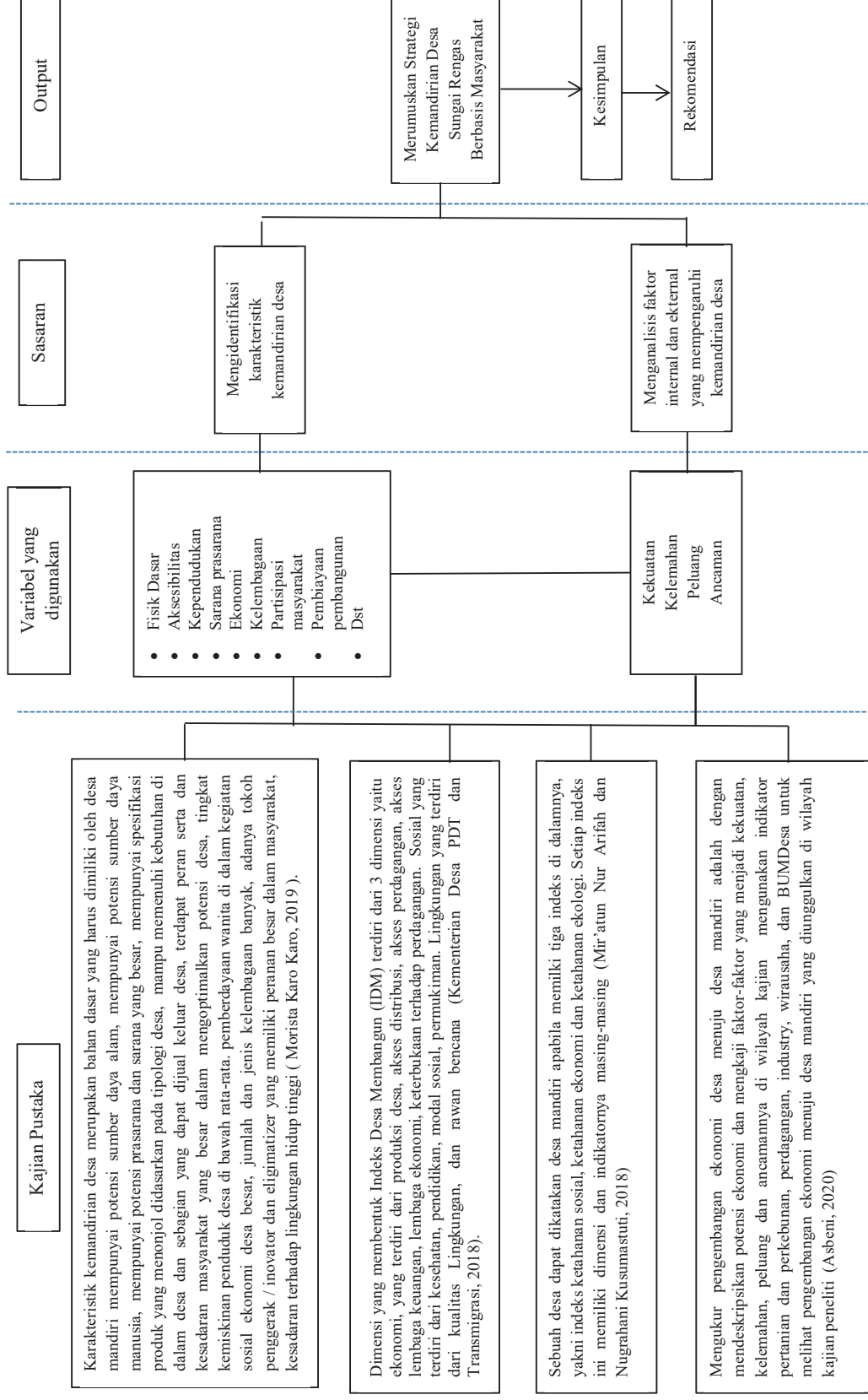
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil
				<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi 		program desa mandiri pangan di kabupaten bandung adalah positif.
6.	1. Aji Rayi Purwasi 2. Retno Sunu Astuti (2021)	Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blora	Untuk menganalisis upaya pembangunan kemandirian desa yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang disalurkan kepada masing-masing desa di Kabupaten Blora.	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pemanfaatan Dana Desa Kendala dalam Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Dukungan Dana Desa 	Deskriptif	Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk menunjang pembangunan kemandirian desa dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Blora memiliki peluang dalam pengelolaan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan meningkatkan indikator keberhasilan pada peningkatan kesadaran masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan; pengembangan dan penguatan daya masyarakat dengan dana desa untuk prioritas kegiatan optimalisasi pengelolaan sumber daya desa; dan perlindungan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah dan kelembagaan desa sebagai pendamping dengan menetapkan kebijakan dan program kegiatan masyarakat melalui dana desa. Ketercapaian penggunaan dana desa yang berasal dari APBN ditujukan sebagai dukungan yang bersifat dinamis bagi desa dalam membangun kemandirian yang

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil
7.	Muhamad Sukarno (2020)	Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM) (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten)	Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Modal Sosial • Kesehatan • Pendidikan • Pemukiman • Kualitas lingkungan • Potensi rawan bencana • Tanggap bencana • Keragaman produksi masyarakat desa • Tersedianya Pusat perdagangan • Akses distribusi dan logistic • Akses ke lembaga keuangan • Lembaga Ekonomi • Keterbukaan wilayah 	Metode penelitian deskriptif dan Analisis naratif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Ponggok yang ditetapkan sebagai desa wisata. Kemudian statusnya sebagai desa wisata tersebut kini telah berubah menjadi desa mandiri. Hal ini mengingat perubahan pola kehidupan masyarakat baik dari segi sosial maupun dari segi perekonomian. Selain itu Desa Ponggok sendiri memiliki tingkat pendapatan yang sangat besar berkat kesuksesannya dalam mengelola aset desa melalui BUMDes Tirta Mandiri

bertumpu pada masyarakat.

Sumber: *Kajian literatur, 2022*

2.8. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori